

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PERENCANAAN PEMBELAJARAN PPKn BERBASIS STUDENT CENTERED LEARNING

Andi Suhardiyanto¹
andspkn@mail.unnes.ac.id

Abstrak: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang need assesment kaitannya dengan pengembangan Bahan Ajar Perencanaan Pembelajaran PKN berbasis Student Centered Learning (SCL). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Responden penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa jurusan PKN, serta guru mata pelajaran PPKn di Kota Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, angket dan dokumentasi. Need Assesment dalam pengembangan bahan ajar diperlukan untuk mendapatkan kajian materi yang selalu berkembang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan waktu. Dalam pengembangan bahan ajar ini need assesment yang perlu mendapatkan penekanan lebih prioritas pada pengembangan bahan ajar Perencanaan pembelajaran adalah pada aspek merumuskan indikator pencapaian kompetensi, desain analisis materi pelajaran, model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Struktur kajian isi dalam pengembangan bahan yang diharapkan dalam pengembangan bahan ajar dari cakupan yang lebih luas menuju ke cakupan yang lebih sempit dan mendalam. Hal ini dimaksudkan bahwa struktur kajian isi dalam buku ajar idealnya beranjak dari kajian yang umum menuju kajian yang lebih spesifik dengan substansi isi yang lebih dalam, mudah dipahami dan dengan contoh yang aplikatif. Disamping itu bahan ajar yang dikembangkan diharapkan juga disusun secara sistematis, runtut dan terstruktur. Artinya desain struktur kajian materi dalam bahan ajar harus merupakan suatu system yang saling berkelanjutan antara satu bagian dengan bagian yang lain, tidak terpisah-pisah sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang komprehensif

Kata Kunci: Bahan Ajar, Student Centered Learning

PENDAHULUAN

Hakikat pendidikan di Indonesia adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu menghadapi tantangan hidup yang kompetitif, dapat memilih dan mengolah informasi untuk digunakan dalam mengambil keputusan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitarnya. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional seperti yang yertuang dalam Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar menjadi wahana untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai

¹Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

tujuan tersebut, maka harus didukung dengan penyempurnaan kurikulum, pengembangan sumber daya manusianya, dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan termasuk didalamnya Perguruan Tinggi memiliki sistem pendidikan yang berbentuk kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pada hakekatnya tujuan kurikulum adalah menifestasi dari tujuan khusus pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum yang bersangkutan. Evaluasi suatu kurikulum dapat merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari usaha evaluasi pendidikan yang bersangkutan, yaitu merupakan kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum pendidikan dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Perubahan kurikulum yang terjadi akan membawa pengaruh terhadap perubahan fokus orientasi, standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar yang diharapkan masing-masing mata pelajaran, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, materi pelajaran, dan penilaian.

Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu institusi pendidikan (dulunya IKIP Semarang) mempunyai tugas salah satunya adalah mencetak calon guru profesional. Dengan perubahan kurikulum yang dinamis perguruan tinggi dalam menghasilkan

calon guru mempunyai tanggung jawab dan tantangan yang berat. Untuk mewujudkan calon guru yang profesional yang dapat mensikapi perubahan kurikulum, perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan perkuliahan baik dari segi peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan budaya literasi. Peningkatan kualitas perkuliahan dapat dilakukan dengan cara tercukupinya bahan ajar mata kuliah yang update serta mendukung capaian kompetensi/pembelajaran yang telah ditetapkan. Tercukupinya bahan kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi/kompetensi diharapkan mampu membekali calon guru lulusan UNNES sehingga mampu untuk berkompetisi di dunia kerja serta mempunyai kesiapan dalam menghadapi perubahan kurikulum di dunia kerja yang ditekuninya. Menurut Sanjaya (2007:133-134), ada beberapa asumsi yang mendasari perlunya pembelajaran berorientasi pada aktivitas peserta didik yaitu asumsi filosofis tentang pendidikan, asumsi tentang peserta didik sebagai subyek pendidikan, asumsi tentang pendidik, dan asumsi yang berkaitan dengan proses pembelajaran

Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran sebagai salah satu mata kuliah wajib di Program Studi PPKn merupakan salah satu mata kuliah yang mempunyai capaian pembelajaran memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat menyusun desain instruksional yang merupakan salah satu kemampuan wajib dimiliki oleh calon guru profesional. Mata kuliah perencanaan pembelajaran tidak bisa

dilepaskan dari dinamika perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan mau tidak mau dosen harus selalu menyesuaikan dan mengkolaborasikan bahan ajar serta materi perkuliahan dengan perubahan kurikulum tersebut. Prastowo (2012:17) menyatakan bahwa bahan ajar pada dasarnya merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.

Sebagai mata kuliah berbasis praktik, mata kuliah perencanaan pembelajaran dalam proses perkuliahannya lebih menekankan aktivitas mahasiswa. Mahasiswa dengan bimbingan dosen diberikan keleluasaan dalam memahami konsep desain instruksional berdasarkan teori-teori pada literature yang ditetapkan yang pada akhirnya mahasiswa dapat menyusun desain instruksional sesuai dengan kurikulum yang tengah berlaku. Selama ini bahan ajar yang digunakan masih banyak menekankan pada teori dan praktik secara terpadu. Desain struktur bahan ajar masih lebih banyak menekankan pada kognitifitas, belum mengarah dan belum dilengkapi dengan contoh-contoh yang sesuai dengan perubahan kurikulum yang ada, dimana penekanan pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas pembelajar (Student Centered Learning).

Hal ini diperkuat lagi dengan kurikulum yang digunakan Universitas Negeri Semarang yaitu KKNi dan Konservasi dimana perkuliahan yang dilaksanakan salah satunya adalah dengan model Student Centered Learning semakin mendukung bahwa kebutuhan pengembangan bahan ajar perkuliahan di Universitas Negeri Semarang khususnya yang berbasis pendekatan SCL sangat diperlukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan bahan ajar perencanaan pembelajaran berbasis student centered learning sangat diperlukan dalam upayanya membekali calon guru PPKn menjadi guru profesional. Penelitian ini merupakan penelitian multi tahun dengan roadmap penelitian yaitu tahun pertama adalah tahap identifikasi tentang need assesment terkait dengan pengembangan bahan ajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *need assesment* dan desain struktur kajian isi dalam pengembangan bahan ajar perencanaan pembelajaran PPKn berbasis *Student Centered Learning (SCL)*?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang *need assesment* kaitannya dengan pengembangan Bahan Ajar Perencanaan Pembelajaran PPKn berbasis Student Centered Learning (SCL). Responden penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa jurusan Politik dan Kewarganegaraan khususnya Program

studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS Unnes. Untuk menambah kedalaman khasanah kajian bahan ajar responden penelitian ini juga menggunakan guru mata pelajaran PPKn untuk mendapatkan data terkait dengan dinamika perubahan desain dalam perencanaan pembelajaran dilapangan dan kendala-kendala yang dihadapi. Sedangkan metode pengumpul data meliputi observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil dan Pembahasan ***Need assesment* dalam pengembangan bahan ajar perencanaan pembelajaran PPKn berbasis Student Centered Learning (SCL)**

Berdasarkan data yang peneliti temukan dilapangan (wawancara, angket dan dokumentasi) maka dapat diuraikan bahwa *need assesment* pengembangan bahan ajar pada mata kuliah perencanaan pembelajaran berbasis SCL dapat diuraika sesuai dengan indikator/aspek sebagai berikut.

Pertama, terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru/calon guru di lapangan dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran PPKn menunjukkan bahwa aspek kajian *pemetaan kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, Merumuskan Indikator Pencapaian Pembelajaran, Penyusunan materi pembelajaran, Penentuan model pembelajaran yang dipakai untuk mengaktifkan peserta didik/mahasiswa dalam mendapatkan pengalaman belajar, Penentuan media pembelajaran, Penyusunan evaluasi pembelajaran, dan penyusunan bahan*

ajar adalah bahan kajian yang diharapkan mendapatkan penekanan dalam pengembangan bahan ajar. Dari beberapa aspek tersebut, data di lapangan menunjukkan bahwa aspek yang perlu mendapatkan penekanan lebih prioritas adalah pada *aspek merumuskan indikator pencapaian kompetensi, desain analisis materi pelajaran, model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran* yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.

Kedua, terkait dengan kebutuhan materi yang dibutuhkan dalam pengembangan bahan ajar berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa.

a. *Terkait dengan aspek pemetaan kompetensi Inti dan Kompetensi dasar* berdasarkan data di lapangan menunjukkan *need assesment* adanya harapan penekanan /ditambahkan kajian materi tentang: definisi, manfaat, hubungan, dasar hukum, prosedur bagaimana memetakaan, dan petunjuk teknis pemetaan, analisis baik tugas, jenis evaluasi yang sesuai , dan kesesuaian model pembelajaran dalam kompetensi Inti dan kompetensi dasar dalam pengembangan bahan ajar.

b. *Terkait dengan aspek merumuskan indikator pencapaian pembelajaran* menunjukkan bahwa *need assesment* di lapangan yang diharapkan mendapat penekanan dalam pengembangan bahan ajar antara lain definisi, prinsip-prinsip perumusan, menentukan kata kerja operasional (KKO) yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar dan pembelajaran berbasis SCL,

keterukuran pencapaian indicator, kelanjutan dengan penentuan bentuk evaluasi, serta teknik perumusan indicator yang benar.

- c. ***Terkait dengan aspek penyusunan materi pembelajaran***, berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan yang diharapkan menjadi penekanan dalam pengembangan bahan ajar pada aspek ini adalah kajian materi antara lain bagaimana menentukan cakupan materi (dari sempit menuju ke luas), prinsip-prinsip dalam penyusunan materi pembelajaran, analisis materi secara prosedur (menentukan ketercukupan materi), bagaimana menentukan sumber belajar yang bisa digunakan untuk penyusunan materi, serta teknik penentuan materi pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar dengan berbasis pembelajaran SCL.
- d. ***Terkait dengan aspek penentuan model pembelajaran yang dipakai untuk mengaktifkan peserta didik/mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar*** menunjukkan perlunya *need assessment* terkait dengan hakikat pembelajaran aktif berbasis SCL, prinsip-prinsip penentuan model pembelajaran yang sesuai, karakteristik model-model pembelajaran beserta sintaknya yang berbasis SCL, serta Pemetaan model pembelajaran didasarkan pada kompetensi dasar yang ada (tiap kompetensi dasar ditunjukkan dengan alternative model pembelajaran yang bisa dilakukan) serta teknik praktis pembelajaran berbasis SCL pada salah satu model pembelajaran,

e. ***Terkait dengan aspek penentuan media pembelajaran*** berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan yang diharapkan menjadi penekanan dalam pengembangan bahan ajar pada aspek ini adalah karakteristik media pembelajaran berbasis pembelajaran SCL, prinsip-prinsip penentuan media pembelajaran berbasis SCL, model-model media pembelajaran PPKn berbasis SCL, kelebihan dan kelemahan media pembelajaran, serta contoh desain model pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang sedang diajarkan.

f. ***Terkait dengan aspek penyusunan evaluasi pembelajaran*** berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan yang diharapkan menjadi penekanan dalam pengembangan bahan ajar pada aspek ini adalah karakteristik penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan, prinsip-prinsip penyusunan alat evaluasi, penyusunan kisi-kisi sesuai dengan karakteristik penilaian, desain instrument evaluasi untuk ketercukupan dan terpenuhinya kompetensi dasar, validitas dan reliabilitas tes, analisis hasil evaluasi, serta panduan teknis evaluasi pembelajaran baik untuk sikap, kognitif, dan ketrampilan.

Ketiga, terkait dengan aspek basis pembelajaran berbasis *Student Centered Learning* (SCL) pada pengembangan bahan ajar beberapa harapan menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran lebih ditekankan pada peserta didik/mahasiswa, guru/dosen

sebagai fasilitator. Harapan terkait pengembangan bahan ajar yang berbasis student centered learning (SCL) pada Perencanaan Pembelajaran dan pengelolaan Pembelajaran PPKn antara lain: **Pertama**, lebih memberikan ruang kepada peserta didik/mahasiswa melaksanakan aktivitas pengalaman belajar dengan memberikan tugas mandiri maupun tugas kelompok yang berorientasi pada penguasaan materi dan implementasi dari materi yang telah ditetapkan. Penugasan dilengkapi dengan langkah-langkah penyelesaian tugas sehingga peserta didik/mahasiswa didik dapat menyelesaikan tugas secara mandiri maupun berkelompok sedangkan guru/dosen memfasilitasi ketika peserta didik/mahasiswa mengalami kesulitan. **Kedua**, hendaknya bahan ajar tidak terlalu rumit/sulit untuk dipahami peserta didik/mahasiswa. Penulisan dan penyajian materi harus sistematis dan runtut dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik/mahasiswa. **Ketiga**, pada pengembangan bahan ajar hendaknya diberikan secara terperinci terkait panduan-panduan bagaimana praktik melaksanakan pembelajaran berbasis SCL.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek yang perlu mendapatkan penekanan lebih prioritas pada pengembangan bahan ajar Perencanaan pembelajaran adalah pada aspek merumuskan indikator pencapaian kompetensi perlu penekanan pada bahan kajian antara lain tentang definisi, prinsip-prinsip perumusan, menentukan kata kerja operasional (KKO) yang

sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar dan pembelajaran berbasis SCL, keterukuran pencapaian indikator, kelanjutan dengan penentuan bentuk evaluasi, serta teknik perumusan indikator yang benar. Pada aspek desain analisis materi pelajaran perlu penekanan pada bahan kajian antara lain tentang bagaimana menentukan cakupan materi (dari sempit menuju ke luas), prinsip-prinsip dalam penyusunan materi pembelajaran, analisis materi secara prosedur (menentukan ketercukupan materi), bagaimana menentukan sumber belajar yang bisa digunakan untuk penyusunan materi, serta teknik penentuan materi pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar dengan berbasis pembelajaran SCL. Pada aspek model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn perlu penekanan pada bahan kajian antara lain tentang hakikat pembelajaran aktif berbasis SCL, prinsip-prinsip penentuan model pembelajaran yang sesuai, karakteristik model-model pembelajaran beserta sintaknya yang berbasis SCL, serta Pemetaan model pembelajaran didasarkan pada kompetensi dasar yang ada (tiap kompetensi dasar ditunjukkan dengan alternative model pembelajaran yang bisa dilakukan) serta teknik praktis pembelajaran berbasis SCL pada salah satu model pembelajaran. Pada aspek media pembelajaran perlu penekanan pada bahan kajian antara lain tentang karakteristik media pembelajaran berbasis pembelajaran SCL, prinsip-prinsip penentuan media pembelajaran berbasis SCL, model-model media pembelajaran PPKn berbasis SCL,

kelebihan dan kelemahan media pembelajaran, serta contoh desain model pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang sedang diajarkan. Pada aspek evaluasi pembelajaran perlu penekanan pada bahan kajian antara lain tentang karakteristik penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan, prinsip-prinsip penyusunan alat evaluasi, penyusunan kisi-kisi sesuai dengan karakteristik penilaian, desain instrument evaluasi untuk ketercapan dan terpenuhinya kompetensi dasar, validitas dan reliabilitas tes, analisis hasil evaluasi, serta panduan teknis evaluasi pembelajaran baik untuk sikap, kognitif, dan ketrampilan.

Pada setiap aspek dalam pengembangan bahan ajar perlu ditambahkan ruang aktivitas pengalaman belajar dengan memberikan tugas mandiri maupun tugas kelompok yang berorientasi pada penguasaan materi dan implementasi dari materi yang telah ditetapkan. Desain bahan ajar tidak terlalu rumit/sulit untuk dipahami peserta didik/mahasiswa. Penulisan dan penyajian materi harus sistematis dan runtut dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik/mahasiswa serta hendaknya diberikan secara terperinci terkait panduan-panduan bagaimana praktik melaksanakan pembelajaran berbasis SCL

Desain struktur kajian isi dalam pengembangan bahan ajar perencanaan pembelajaran PPKn berbasis Student Centered Learning (SCL).

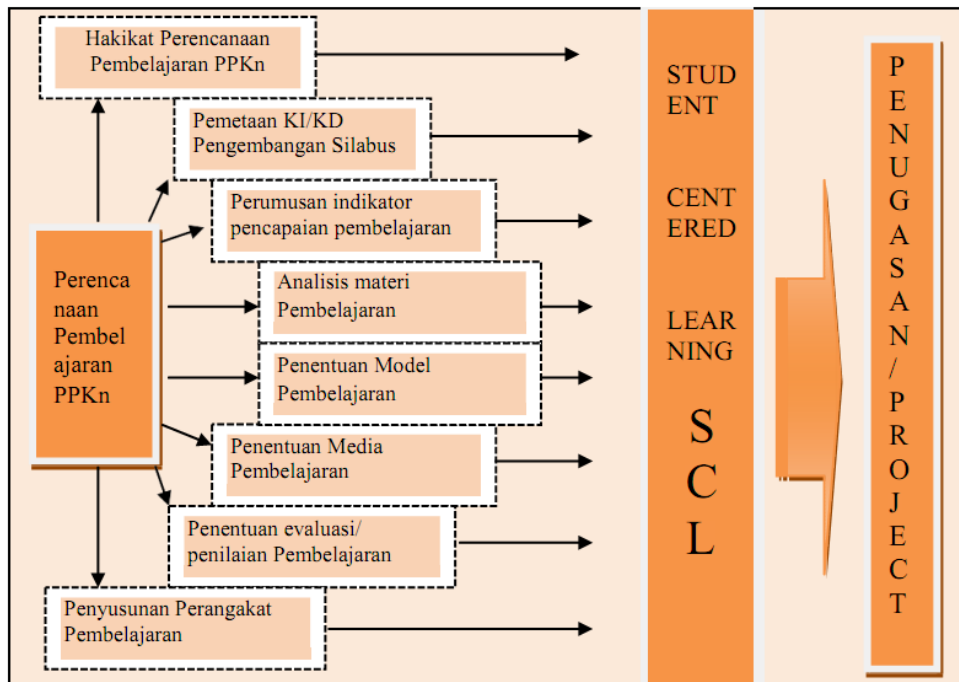
Desain struktur kajian isi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur materi kajian itu disusun secara berurutan dan sistematis dalam pengembangan bahan ajar pada matakuliah Perencanaan Pembelajaran PPKn berbasis *student centered learning*. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa desain struktur kajian isi yang diharapkan dalam pengembangan bahan ajar dari *cakupan yang lebih luas menuju ke cakupan yang lebih sempit dan mendalam*. Hal ini dimaksudkan bahwa struktur kajian isi dalam buku ajar idealnya beranjak dari kajian yang umum menuju kajian yang lebih spesifik dengan substansi isi yang lebih dalam, mudah dipahami dan dengan contoh yang aplikatif. Dismaping itu bahan ajar yang dikembangkan diharapkan juga disusun secara sistematis, runtut dan terstruktur. Artinya desain struktur kajian materi dalam bahan ajar harus merupakan suatu system yang saling berkelanjutan antara satu bagian dengan bagian yang lain, tidak terpisah-pisah sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang komprehensif.

Struktur kajian isi dalam pengembangan bahan ajar Perencanaan Pembelajaran PPKn berdasarkan harapan dan masukan dari data yang peneliti peroleh adalah pada bagian awal adalah *hakikat perencanaan pembelajaran PPKn* struktur kajian isi materi meliputi

arti, makna, mengapa diperlukan, prinsip-prinsip, komponen yang mempengaruhi, dan karakteristik pembelajaran PPKn dan diakhir bab diberikan penugasan untuk memperdalam kajian tentang materi sebelumnya. Bab selanjutnya adalah Pemetaan KI/KD dan Pengembangan silabus struktur kajian isi materi meliputi hubungan kurikulum dan perencanaan pembelajaran, Hubungan KI/KD, prosedur dan teknis pemetaan, analisis evaluasi dan model pembelajaran dan diakhir bab diberikan penugasan untuk memperdalam kajian tentang materi sebelumnya. Pada kajian isi terkait dengan perumusan indicator pencapaian kompetensi struktur kajian isi materi meliputi prinsip-prinsip perumusan, tingkatan taksonomi pembelajaran, kata kerja operasional (KKO) yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar dan pembelajaran berbasis SCL, keterukuran pencapaian indicator, kelanjutan dengan penentuan bentuk evaluasi, serta teknik perumusan indicator yang benar serta diakhir bab diberikan penugasan untuk memperdalam kajian tentang materi sebelumnya. Pada analisis materi pembelajaran struktur kajian isi materi meliputi sumber belajar, prinsip penyusunan dan penentuan analisis materi pembelajaran, tahapan analisis materi pembelajaran diakhir bab diberikan penugasan untuk memperdalam kajian tentang materi sebelumnya. Pada bab *penentuan media pembelajaran* struktur kajian isi materi

meliputi karakteristik media pembelajaran berbasis pembelajaran SCL, prinsip-prinsip penentuan media pembelajaran berbasis SCL, model-model media pembelajaran PPKn berbasis SCL, kelebihan dan kelemahan media pembelajaran, serta contoh desain model pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang sedang diajarkan. Pada kajian tentang **penyusunan evaluasi pembelajaran** struktur kajian isi materi meliputi karakteristik penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan, prinsip-prinsip penyusunan alat evaluasi, penyusunan kisi-kisi sesuai dengan karakteristik penilaian, desain instrument evaluasi untuk ketercakupan dan terpenuhinya kompetensi dasar, validitas dan reliabilitas tes, analisis hasil evaluasi, serta panduan teknis evaluasi pembelajaran baik untuk sikap, kognitif, dan ketrampilan.

Berdasarkan hal tersebut maka struktur kajian isi dalam pengembangan bahan ajar dapat ditampilkan dalam tabel berikut.



Pembahasan

Pengembangan bahan ajar diperlukan untuk mendapatkan kajian materi yang selalu berkembang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan waktu. Demikian juga pengembangan bahan ajar perencanaan pembelajaran PPKn. Dalam pengembangan bahan ajar ini temuan yang perlu mendapatkan penekanan lebih prioritas pada pengembangan bahan ajar Perencanaan pembelajaran adalah pada aspek merumuskan indikator pencapaian kompetensi, desain analisis materi pelajaran, model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Untuk memperkaya wahana latihan bagi peserta didik bahan ajar sebaiknya tidak hanya sebatas pada uraian materi saja namun juga perlu ditambahkan ruang aktivitas pengalaman belajar dengan memberikan tugas mandiri maupun tugas kelompok yang

berorientasi pada penguasaan materi dan implementasi dari materi yang telah ditetapkan. Desain bahan ajar tidak terlalu rumit/sulit untuk dipahami peserta didik/mahasiswa. Penulisan dan penyajian materi harus sistematis dan runtut dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik/mahasiswa serta hendaknya diberikan secara terperinci terkait panduan-panduan bagaimana praktik melaksanakan pembelajaran berbasis SCL. Hal ini sesuai dengan penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Guruan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003, bahan ajar memiliki beberapa karakteristik, yaitu *self instructional, self contained, stand alone, adaptive, dan user friendly*.

Pembelajaran berbasis *Student Centered Learning (SCL)* pada pengembangan bahan ajar harus paling

tidak mempunyai kriteria lebih memberikan ruang kepada peserta didik/mahasiswa melaksanakan aktivitas pengalaman belajar dengan memberikan tugas mandiri maupun tugas kelompok yang berorientasi pada penguasaan materi dan implementasi dari materi yang telah ditetapkan. Penugasan dilengkapi dengan langkah-langkah penyelesaian tugas sehingga peserta didik/mahasiswa didik dapat menyelesaikan tugas secara mandiri maupun berkelompok sedangkan guru/dosen memfasilitasi ketika peserta didik/mahasiswa mengalami kesulitan. Disamping itu hendaknya bahan ajar tidak terlalu rumit/sulit untuk dipahami peserta didik/mahasiswa dengan menambahkan tujuan pembelajaran sehingga peserta didik mudah untuk memahaminya. Penulisan dan penyajian materi harus sistematis dan runtut dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik/mahasiswa. Pada pengembangan bahan ajar hendaknya diberikan secara terperinci terkait panduan- panduan bagaimana praktik melaksanakan pembelajaran berbasis SCL.

Hal ini sesuai dengan pendapat Angele Attard (2010) dari Education International mengungkapkan, terdapat banyak manfaat proses belajar dengan pendekatan SCL baik bagi kalangan mahasiswa maupun dosen. Beberapa manfaat bagi kalangan mahasiswa, antara lain : Pertama, menjadikan para mahasiswa sebagai bagian integral dari komunitas akademik. Sebenarnya, mahasiswa kini disebut sebagai *civitas academica*, akan tetapi, seringkali posisi

itu tidak terwujud hanya karena dosen tidak memperlakukan mereka sebagai masyarakat akademik, melainkan objek ceramah dosen yang—sekali waktu—diukur tingkat pemahamannya terhadap kandungan ceramah tersebut. Sebagai masyarakat akademik, tentu mahasiswa memiliki hak untuk melakukan proses inquiry, proses pencarian dan pengkajian, serta proses pemahaman yang dilakukan oleh mereka sendiri. Melalui SCL mereka memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian dan mempresentasikannya di hadapan peer group dan dosen mereka. Selanjutnya, dosen harus memberi masukan terhadap hasil penelitian para mahasiswanya. Dengan demikian, para mahasiswa benar-benar menjadi masyarakat akademik sebagaimana diidealkan. Kedua, meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Hal ini karena SCL memperlakukan mahasiswa sebagai masyarakat akademik yang harus menguasai teori, mengaplikasikannya, dan terus melakukan kajian dan evaluasi atas teori tersebut. Selain itu, para mahasiswa juga dituntut untuk mempresentasikan hasil kajiannya pada peer group dan dosen pembinanya. Dengan demikian, mahasiswa akan termotivasi untuk memperbanyak kegiatan belajar di luar kelas sehingga nantinya menjadi masyarakat pembelajar.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka simpulan penelitian ini adalah: 1) need assesment dalam pengembangan bahan ajar diperlukan untuk mendapatkan kajian

materi yang selalu berkembang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan waktu. Dalam pengembangan bahan ajar ini perlu assesment yang perlu mendapatkan penekanan lebih prioritas pada pengembangan bahan ajar. Perencanaan pembelajaran adalah pada aspek merumuskan indikator pencapaian kompetensi, desain analisis materi pelajaran, model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Struktur kajian isi dalam pengembangan bahan yang diharapkan dalam pengembangan bahan ajar dari *cakupan yang lebih luas menuju ke cakupan yang lebih sempit dan mendalam*. Hal ini dimaksudkan bahwa struktur kajian isi dalam buku ajar idealnya beranjak dari kajian yang umum menuju kajian yang lebih spesifik dengan substansi isi yang lebih dalam, mudah dipahami dan dengan contoh yang aplikatif. Dismaping itu bahan ajar yang dikembangkan diharapkan juga disusun

secara sistematis , runtut dan terstruktur. Artinya desain struktur kajian materi dalam bahan ajar harus merupakan suatu system yang saling berkelanjutan antara satu bagian dengan bagian yang lain, tidak terpisah-pisah sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. (2012). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Attard, Angela, et all. 2010. *Student Centred Learning, Toolkit for students Staffs, and Higher Education Institution*. Education International and the European Student Union, Brussel, Belgia.
- Satori, Djam'an, dkk, 2007, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Universitas Terbuka Sanjaya, W. (2007). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALIKOTA SEMARANG DI KOTA SEMARANG

Eta Yuni Lestari¹, Nugraheni Arumsari²

etayuni@mail.unnes.ac.id, nugraheni.arum@mail.unnes.ac.id

Abstrak: Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah. Tahun 2015 Kota Semarang menyelenggarakan Pemilukada untuk memilih walikota. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilukada di Kota Semarang. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemula dalam pemilukada maupun pada pemilihan presiden pada tahun 2019, maka perlu dilakukan kajian penelitian tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula menjelang Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang, mengetahui peran partai politik, KPU, maupun perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, mengetahui kesiapan para pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota Semarang di Kota Semarang.

Penelitian dirancang dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota Semarang pada tahun 2015 di Kota Semarang. Sasaran penelitian ini adalah para pemilih pemula yang telah menggunakan hak pilih yang pertama kali pada pemilihan Walikota Semarang, adapun sampel penelitian adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang merupakan pemilih pemula di kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan pemilih pemula belum memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan dan tidak ada persiapan yang khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dipengaruhi oleh visi dan misi ketika terpilih, latar belakang calon (tingkat pendidikan, agama), faktor sosial atau kedekatan calon dengan masyarakat, kinerja calon baik pada saat menjadi walikota sebelumnya (bagi calon *incumbent*), dan kinerja pada pekerjaannya, *Track record* calon, faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum).

Kata Kunci: partisipasi politik, pemilih pemula, pemilukada

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sebuah sistem politik dalam negara yang menjadi dambaan, khususnya bagi orang yang mempunyai kesadaran politik untuk dapat diwujudkan kedalam perbuatan sehari-hari. Di Indonesia, demokrasi sangatlah

dibangga-banggakan, dianggap paling ideal karena memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rakyat, memberi peluang pada mereka untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan publik, mengutarakan pendapat, mendirikan

^{1,2}Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

organisasi yang bernilai positif yang tidak merugikan masyarakat.

Berbicara tentang demokrasi tentunya tidak bisa lepas dari politik, karena untuk mewujudkan negara yang demokratis, sebuah kegiatan politik sangat diperlukan. Seperti yang kita ketahui perjalanan demokrasi politik di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sejak masa pasca-kemerdekaan hingga sekarang, yaitu mengenai pemerintahan parlementer (*presentative democracy*), pemerintahan demokrasi dipimpin (*guided democracy*), dan pemerintahan orde Baru (*Pancasila Democracy*) (Gaffar, 2006:10). Perubahan sistem pemerintahan ini memiliki tujuan untuk membangun demokrasi yang benar-benar ideal dan pas untuk diterapkan di Indonesia. Maka diharapkan konsekuensi logis dari perubahan sistem pemerintahan di Indonesia tentunya membawa perubahan sistem politik di Indonesia, yang tentunya membawa dampak bagi jalannya pemerintahan.

Salah satu wujud pelaksanaan negara yang demokratis adalah dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sebagai sarana demokratisasi telah digunakan di sebagian negara tidak terkecuali Indonesia yang *nota bene* memiliki masyarakat yang heterogen. Pemilu sering diartikan sebagai suatu kegiatan yang dinilai sebagai wujud atau parameter suatu negara demokratis atau tidak, akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri, karena masih terdapat manipulasi politik, kecurangan, ketidakadilan, mobilisasi, *money politic*, yang menimbulkan persoalan yang

berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi jalannya pemerintahan.

Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi dengan tujuan untuk memilih anggota Legislatif dan Eksekutif (Presiden/Kepala Daerah). Sejak Juni 2004, terdapat revolusi besar-besaran, mengikuti pemilihan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bulan Juni 2005 proses pemilihan kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota yang sebelumnya dipilih oleh DPRD berganti dipilih secara langsung oleh rakyat dengan harapan mengembalikan kedaulatan pada pemilihnya. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari praktik *money politics* dan reduksi dari para elit partai dalam pemilihan kepala daerah.

Tahun 2014 mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mengalami perubahan, dari memilih secara langsung menjadi secara perwakilan melalui DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa, maka dikeluarkan Perpu No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dikembalikan kembali kepada rakyat, yaitu pemilihan secara langsung.

Pemilukada merupakan manifestasi demokrasi yang bertujuan untuk memilih Kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan Pemilukada secara langsung merupakan wujud demokrasi formal. Dari tahun 2005 pelaksanaan Pemilukada di beberapa daerah mengalami hambatan dan menimbulkan berbagai macam konflik, baik konflik secara vertikal maupun secara horizontal, misalnya, berubahnya tujuan Pemilukada yang dijadikan sebagai ajang untuk mengumpulkan dana partai politik, kecurangan, *money politic*, biaya yang sangat mahal, rendahnya partisipasi pemilih, sengketa Pemilukada, dll.

Persoalan yang sering muncul terkait proses pemilukada adalah masih rendahnya partisipasi pemilih. Hasil survey pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014, menyatakan bahwa 43% pemilih pada tahun 2014 adalah pemilih pemula (Perludem, 2014). Rendahnya partisipasi pemilih pemula disebabkan karena kurangnya kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang disebabkan kurangnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Hal ini yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik pemilih pemula.

Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah. Tahun 2015 Kota Semarang menyelenggarakan Pemilukada untuk memilih walikota. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula karena akan

menggunakan hak pilih lagi pada pemilihan presiden tahun 2019. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilukada di Kota Semarang. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemula dalam pemilukad, maka perlu dilakukan kajian penelitian tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dirancang dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota Semarang di Kota Semarang. Lokasi Penelitian yang dipilih adalah di Kota Semarang, dengan sampel penelitian adalah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang khususnya semester 1 dan 3 yang akan menggunakan hak pilih yang pertama kali pada pemilihan Walikota Semarang. Peneliti menjadikan sampel penelitian karena mahasiswa semester 1 dan 3 tergolong dalam pemilih pemula, yang baru pertama kali menggunakan hak pilih untuk memilih Calon Walikota Semarang.

Untuk menggali data digunakan angket secara mendalam untuk memperoleh informasi tentang pendidikan politik pemilih pemula pada pemilihan Walikota Semarang. Peneliti juga akan menggabungkan sumber opini lain sebagai penguat argumentasi, yakni menggunakan data sekunder yang diambil dari Buku,

Majalah, Jurnal yang terkait untuk pengembangan analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melalui penelitian ini didapatkan hasil mengenai kesiapan pemilih pemula dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihan pada pemilihan walikota (pemilihan wali kota) kota Semarang, yaitu:

1) Partisipasi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilih

Kesiapan pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota Semarang diungkap dengan pertanyaan tentang pengetahuan responden tentang pelaksanaan pemilihan wali kota Semarang. Sebagaimana besar responden mengetahui bahwa Kota Semarang akan menyelenggarakan pemilihan Wali Kota Semarang. Pemahaman responden yang merupakan pemilih pemula tentang pelaksanaan Pemilihan walikota Semarang ternyata masih ada yang tidak tahu pasti tanggal penyelenggaraan pemilihan wali kota Semarang. Pelaksanaan pemilihan wali kota Semarang merupakan implementasi pertama pilkada serentak, yang masih banyak menuai perdebatan terkait kesiapan Negara dalam melaksanakan pilkada serentak, baik mengenaik teknis pelaksanaan, konflik pemilihan umum, sengketa hasil pemilihan umum, dan upaya penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum pemilihan walikota.

Kesiapan pemilih pemula juga dilihat dari pengetahuan calon pemilih pada kontestan pemilihan wali kota Semarang, dari hasil penelitian responden

sebagian besar sudah mengetahui kontestan pemilihan wali kota Semarang, walaupun ada juga yang belum tahu secara pasti dari nama-nama kontestan pemilihan wali kota Semarang. Pemahaman pemilih terhadap kontestan pemilihan wali kota Semarang, sudah pasti mempengaruhi calon pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota Semarang. Hasil penelitian tentang kesiapan pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan wali kota Semarang, calon pemilih sebagian besar akan menggunakan hak pilihnya. Alasan menggunakan hak pilih pada pemilihan wali kota Semarang adalah kesadaran mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan walikota Semarang. Calon pemilih pada umumnya memiliki rasa penasaran dan keinginan untuk mengikuti kegiatan politik yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali tersebut.

Kesiapan calon pemilih dalam menggunakan hak pilih ditentukan oleh berbagai faktor baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam dipengaruhi oleh kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan wali kota Semarang, sedangkan faktor dari luar pemilih dipengaruhi oleh faktor visi dan misi kontestan pemilihan wali kota, program, *track record* kontestan, latar belakang kontestan, dan pengaruh dari orang lain misalnya orang tua pemilih.

Persiapan yang dilakukan pemilih untuk menentukan pilihan pada pemilihan walikota Semarang dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih mencari informasi terkait hal-hal sebagai berikut ;

1. Visi dan misi calon
2. *Track record* calon
3. Sesuai dengan keyakinan calon
4. Latar belakang pendidikan calon
5. Kesiapan secara administrasi
6. Menambah pengetahuan pemilih dengan belajar tentang konsep pemilu yang LUBER JURDIL
7. Mengikuti kegiatan sosialisasi calon dalam acara kampanye, baik melalui media kampanye, maupun sosialisasi secara langsung oleh calon
8. Melihat kinerja para calon, baik calon *incumbent* maupun calon baru

Selain alasan tersebut di atas ada beberapa responden yang sampai sekarang belum menentukan pilihan, sehingga tidak ada kesiapan sama sekali dalam menentukan pilihan karena alasan belum mengenal kepribadian dari calon walikota. Bahkan ada juga responden yang sama sekali tidak mempersiapkan diri secara khusus dalam menggunakan hak pilih. Hal ini dikarenakan adanya faktor tidak percaya terhadap para calon walikota Semarang, mereka menganggap bahwa tidak ada perubahan yang berarti setelah mereka menggunakan hak pilih mereka, tidak heran jika responden sampai sekarang ada yang tidak menyiapkan secara khusus dalam menggunakan hak pilih walikota Semarang.

Kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilih salah satunya dipengaruhi oleh seberapa banyak pengetahuan dan pendidikan politik yang mereka miliki. Pengetahuan responden tentang pemilihan walikota ternyata masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait pemilihan walikota Semarang, baik sosialisasi dari

KPU, dari calon walikota, maupun dari lembaga-lembaga lainnya. Pemilih mendapatkan informasi tentang pemilihan walikota Semarang dari media massa, internet, serta dari media kampanye seperti baliho, liftlet, yang digunakan calon walikota Semarang untuk mempromosikan visi dan misi calon walikota Semarang.

Media kampanye sering digunakan untuk menarik massa pemilih dan dianggap efektif untuk mensosialisasikan program, visi dan misi calon, dari visi dan misi calon setidaknya pemilih memiliki gambaran program yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang kalau terpilih menjadi walikota Semarang, akan tetapi pemahaman pemilih terhadap calon walikota Semarang tentang latar belakang calon walikota Semarang dari hasil penelitian ternyata sebagian besar pemilih tidak mengetahui latar belakang calon. Kurangnya pemahaman pemilih terhadap latar belakang calon tentunya akan mempengaruhi pilihan, selain melihat latar belakang misalkan dari pendidikan calon walikota, pemilih juga melihat visi dan misi dari masing-masing kontestan. Visi dan misi setidaknya memberikan gambaran tentang rencana program kerja yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi walikota. Visi dan misi sering dilihat dari poster atau baliho yang dipasang pada masa kampanye, atau dari iklan baik di radio maupun televisi. Visi dan misi merupakan bentuk kontrak politik antara walikota dengan masyarakat.

Visi-misi, *track record*, dan pengalaman pemilih dalam menggunakan

hak pilih pada pemilu sebelumnya juga berpengaruh terhadap pilihan pemilih. Hasil penelitian tentang pengalaman pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilu sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam menggunakan hak pilih. Sebagaimana besar pemilih sudah pernah menggunakan hak pilih pada pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislative, sementara hak untuk memilih walikota belum pernah menggunakan, artinya pada pemilihan wali kota Semarang, merupakan hak pilih pertama kalinya untuk memilih kepala daerah. Pemilihan walikota di Semarang merupakan implementasi aturan dari pilkada serentak.

2) *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemilih pemula dalam pemilihan wali kota kota Semarang*

Keputusan untuk menggunakan hak pilih dan menentukan pilihan tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih calon walikota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan dan aktualisasi calon terhadap Visi dan misi ketika terpilih
- b. Latar belakang calon (tingkat pendidikan, agama)
- c. Factor sosial atau kedekatan calon dengan masyarakat
- d. Kinerja calon baik pada saat menjadi walikota sebelumnya (bagi calon incumbent), dan kinerja pada pekerjaannya
- e. *Track record* calon

- f. Faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum)

Selain atas dasar faktor-faktor tersebut di atas, faktor paksaan dari orang tua, kerabat, juga menjadi faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemilihan walikota Semarang. Responden yang belum atau tidak punya pilihan sendiri, lebih mempercayakan pilihan kepada orang tua atau kerabat dengan alasan orang tua mereka lebih pengalaman dalam menggunakan hak pilih. Money politik selalu ada dalam pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden, anggota legislatif, maupun pemilihan wali kota. Responden ketika ditanya tentang money politik, sebagian besar mengetahui tentang money politik. Ada responden yang mengakui akan menerima jika ia diberikan sejumlah uang atau barang pada saat pemilihan walikota Semarang, namun tidak pasti akan memilih calon yang sudah memberikan uang maupun bentuk gratifikasi lainnya, akan tetapi ada juga responden yang tidak akan menerima uang dan gratifikasi dalam bentuk apapun, karena money politik adalah awal dari korupsi. Pemilih berharap siapapun walikota yang jadi pada pemilihan walikota Semarang, akan mampu menjalankan amanah dan tugasnya dengan baik untuk kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di kota Semarang.

Kesiapan pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Walikota Semarang dapat dikatakan belum maksimal, walaupun sebagian besar akan menggunakan hak pilih pada

pemilihan walikota Semarang, akan tetapi alasan responden dalam menentukan pilihan masih belum pasti, bahkan masih ada yang belum menentukan pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih pemula belum memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan. Pemilih pemula di satu sisi merupakan jenis pemilih yang bisa menjadi pemilih kritis, karena pemilih pemula sudah tergolong usia remaja menuju dewasa. Usia dewasa merupakan usia dimana semangat sangat tinggi, masih idealis dalam mempertahankan opini, dan komitmen mereka.

Pemilih pemula yang kritis sudah pasti akan menggunakan hak pilih dengan menganalisis dan ikut mengkritisi kinerja pemerintahan. Jenis pemilih pemula yang seperti ini biasanya adalah pemilih yang memiliki pendidikan tinggi dan juga aktif dalam organisasi. Disisi lain pemilih pemula karena baru menggunakan hak pilih yang pertama cenderung lebih mudah untuk dipengaruhi. Jenis pemilih ini biasanya pemilih yang tidak memiliki kesadaran penuh untuk menggunakan hak pilih dengan baik. Faktor yang mendorong adalah kurangnya minat terhadap dunia politik, sehingga dalam menentukan pilihan mereka cenderung pasrah dan mengikuti pilihan orang lain.

Kesiapan pemilih pemula ditentukan oleh kesadaran pemilih dalam menggunakan hak pilih dengan maksimal. Artinya dalam menentukan pilihan pemilih benar-benar menganalisis secara cerdas, dengan harapan akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu melaksanakan dan menjalankan amanah dengan baik. Kesadaran tersebut juga

tidak bisa lepas dari pendidikan politik, pendidikan politik memiliki peranan yang sangat penting khususnya bagi pemilih pemula. Mengingat pemilih pemula lebih mudah untuk dipengaruhi. Pendidikan politik bisa diberikan oleh KPU, atau melalui pendidikan formal, misalnya di sekolah dan perguruan tinggi. Ketika pemilih pemula mendapatkan pendidikan politik, secara tidak langsung ada usaha untuk menumbuhkan kesadaran bagi pemilih pemula untuk menentukan pilihan dengan cerdas, khususnya pada pemilihan walikota Semarang.

Pemilih pemula di Kota Semarang menentukan keputusan politik atas pertimbangan faktor-faktor tertentu, diantaranya adalah figur calon walikota. Hasil penelitian menyatakan mengetahui figur calon walikota yang akan mereka pilih, baik secara langsung maupun secara tidak langsung (melalui tim sukses calon walikota, maupun dari stiker, baliho yang memasang foto calon walikota). Pemilih yang mengetahui figur calon walikota secara langsung pada umumnya adalah masyarakat pemilih yang tinggal dalam satu wilayah yang sama dengan calon walikota, sedangkan bagi masyarakat pemilih yang tidak mengetahui figur calon walikota pada umumnya pemilih yang di daerah pemilih tidak ada warga yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sehingga mereka mengetahui figur calon walikota hanya dari stiker, baliho yang memasang foto calon walikota, dari tim sukses calon walikota, serta isu yang tersebar di masyarakat. Ada pula masyarakat yang memilih karena dasar pertimbangan pada profil/latar belakang calon walikota

misalnya pendidikan calon walikota, *image* calon walikota di masyarakat, dengan alasan orang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan *image* yang positif akan mampu menjadi pemimpin yang baik.

Faktor lainnya adalah program yang ditawarkan. Ketika responden/masyarakat pemilih ditanya mengenai tahu/tidaknya terhadap program yang ditawarkan, hasil wawancara menunjukkan pemilih mengetahui program yang ditawarkan oleh calon walikota. Masyarakat mengetahui program yang ditawarkan dari calon walikota secara langsung pada saat kampanye, maupun melalui tim sukses calon walikota, namun ada juga pemilih yang tidak mengetahui program yang ditawarkan.

Faktor lainnya, adalah pilihan keluarga, walaupun hanya beberapa responden yang mengaku memilih calon walikota berdasarkan pada pilihan keluarga/sama dengan pilihan keluarga, selain factor pilihan keluarga mendasarkan pilihan atas dasar kesamaan agama atau ideologi dengan calon walikota dengan pemilih. Kesamaan agama atau ideology juga dijadikan salah satu pertimbangan, dengan harapan ketika agama dan ideology mereka sama dengan calon walikota yang dipilih, maka akan menghasilkan tujuan yang sama, akan mencapai tujuan yang sama. Secara tidak langsung, maka tujuan masyarakat pemilih juga akan tercapai.

Faktor *money politik* yang seringkali ada pada saat pemilihan umum, responden mengaku akan menerima sejumlah uang atau barang yang diberikan

oleh calon walikota, akan tetapi belum tentu akan memberikan suaranya pada calon yang telah memberikan uang. Selain itu calon pemilih mengaku, biasanya tidak hanya menerima uang dari satu calon walikota saja melainkan dari beberapa calon walikota, sehingga masyarakat masih mempertimbangkan alasan lain dalam memilih calon walikota, misalnya atas dasar figur calon walikota, program yang ditawarkan, profil calon walikota, dan lain sebagainya. sedangkan responden yang memilih calon walikota karena telah diberikan sejumlah uang adalah dengan alasan balas budi karena telah diberikan sejumlah uang.

Tabulasi angket yang telah disebarakan untuk pelaksanaan pemilihan walikota di Kota Semarang dapat disimpulkan masyarakat di Kota Semarang telah melihat program kerja, melalui visi dan misi yang ditawarkan oleh calon walikota. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prosentasi pemilih yang menempatkan program kerja dan visi misi sebagai acuan utama. Program yang ditawarkan dapat mereka peroleh dari calon walikota pada waktu kampanye, serta dari tim sukses calon walikota. Memilih program yang ditawarkan masyarakat berharap, akan mendapatkan pemimpin yang sesuai, yang mampu menyalurkan aspirasi serta membawa pengaruh kepada kehidupan mereka. Masyarakat seringkali melihat kinerja pemerintah sebelumnya, baik melalui media-media elektronik seperti Televisi, serta media massa seperti Koran, dengan berbagai masalah yang ada tak sedikit pula masyarakat yang tidak percaya, kecewa, terhadap wakil-wakil rakyat, akan

tetapi disatu sisi masyarakat juga berkeinginan untuk menciptakan pemimpin yang loyal kepada rakyat, sehingga itu dalam memilih calon walikota mereka mulai berfikir rasional.

Opini publik seringkali menempatkan faktor *money politic* sebagai alasan utama masyarakat dalam memilih calon walikota, namun faktor *money politic* tidak bisa dijadikan sebagai alasan atau penentu calon walikota mampu memenangkan pemilu. Hal ini dikarenakan masyarakat (pemilih) tidak hanya menerima uang dari satu calon saja, akan tetapi juga dari pesaing/calon walikota yang lain, maka dari itu faktor *money politic* tidak bisa dijadikan sebagai faktor utama, walaupun memang ada masyarakat yang masih menjadikan faktor *money politic* sebagai faktor penentu dalam menentukan pilihan politik. Pada umumnya mereka adalah pemilih yang belum mempunyai kesadaran politik, tingkat pendidikan rendah, atau karena perasaan tidak percaya, kecewa kepada kepala daerah.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah,

1. Kesiapan pemilih pemula dalam menentukan pilihan dalam pemilihan walikota Semarang dapat disimpulkan, belum memiliki kesiapan yang maksimal, hal ini dibuktikan dengan hanya sebagian pemilih yang melakukan persiapan untuk menentukan pilihan dengan mencari tahu visi misi, program yang ditawarkan oleh calon walikota Semarang, dan masih ada pemilih yang tidak melakukan persiapan sama

sekali dalam menentukan pilihan pada pemilihan walikota Semarang.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan calon walikota Semarang adalah kejelasan dan aktualisasi calon terhadap Visi dan misi ketika terpilih, Latar belakang calon (tingkat pendidikan, agama), faktor sosial atau kedekatan calon dengan masyarakat, Kinerja calon baik pada saat menjadi walikota sebelumnya (bagi calon *incumbent*), dan kinerja pada pekerjaannya, *Track record* calon, faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum)

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu Dan Perilaku Memilih 1995-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Aswar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asfar Muhammad, 2006, *Mendesain Manajemen Pemilukada*, Surabaya, Pustaka Eureka.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Cholisin dkk. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Pres.

- Duverger, Maurice. 2000. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Igbal Hasan, 2004, *Analisis Data Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sastroatmodjo, Sudijono. *Dalam seminar Politik Transaksional Ancaman Terhadap Demokrasi*, Kamis 2 April 2009.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaukani, Imam dan Thohari Ahsin. 2004. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Jurnal, artikel, bahan ajar:**
- Janedjri Gaffar M, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press (Konpres).
- Ibnu Hastomo Setyo, 2012, "Bunga Rampai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi*, Edisi 4.
- Mahfud MD, 2011. *Risalah Rekaman Konferensi Pers akhir tahun 2010* Membangun Demokrasi Substantif meneguhkan integritas konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Setiajid. 2011. *Orientasi Politik Yang Mempengaruhi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2009 (Studi Kasus Pemilih Pemula Di Kota Semarang)*. Dalam *Jurnal Integralistik*. Volume 22. No 1. Hal 20.
- Handoyo, Eko. *Pendidikan Politik. Bahan Ajar Pendidikan Politik*. PKn. Fis. Unnes.
- Zuhro Siti, MA. 2012, *Memahami Demokrasi Lokal : Pemilukada, Tantangan Dan Prospeknya*, *Jurnal Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi*, Edisi 4.
- Topo Santoso, 2011, "Problem Desain Penanganan dan Pelanggaran Pidana Pemilu", *Jurnal Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi*, Edisi 1.
- The Indonesian Power for Democracy (TIM IPD), 2009, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilukada di Indonesia*, IPD Indonesia, Yogyakarta.
- _____ 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Veri Junaidi, "Sengketa Administrasi Pemilu". *Jurnal Perkumpulan Demokrasi dan Pemilu*. Esisi 1. Tahun 2011.
- Undang-undang no 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
- PERPU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota